

## Upaya Masyarakat Perbatasan Antarnegara dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial

### *Effort of Between-Countries Border Society in Maintaining Social Welfare*

**Elly Kuntjorowati dan Sri Prastyowati**

Balai Besar Penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta, (0274 377265)

Email: Elly Kuntjorowati@gmail.com, HP. 087838724537

Diterima 12 Juli 2017, diperbaiki 8 Agustus 2017, disetujui 10 Desember 2017

#### **Abstract**

*This research is aimed to describe the border community efforts between countries in West Kalimantan especially in maintaining social welfare. This study has 60 respondents taken out of people from rural communities at Jagoi, Jagoi Babang Sub-District, Bengkayang District, West Kalimantan Province, and supportive informants such as stakeholders and community leaders. This decision was carried out purposively in accordance with the needs of relevant data to this research. The data was collected through in-depth interviews, observation and documentation study on secondary data related to the research topic. The respondents were selected on the base of appropriateness to the research goal criteria. The data captured are analyzed qualitatively and are presented in percentage to gain some information which described the border society efforts in maintaining the social welfare. The results showed that the location of the village of Jagoi, Jagoi Babang Sub- District was very far away from the center of government in neither central nor local government, and it was really difficult to reach the location because it was located in the mountainous area, so that the infra-structure built up there was still very inadequate. Education and health facilities were still very minimal, Human Resources capability was still at very low level, there were a lot of unemployment, index of poverty was very high, so that it was much more difficult to maintain their social welfare, and their economic activities depended much on their neighbor country of Malaysia, which in turn brought an impact on the lack of nationalism because of their expectation in earning more Ringgit rather than Rupiah.*

**Keywords:** *inter-state border; social security of society*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya masyarakat perbatasan antarnegara di Kalimantan Barat dalam mempertahankan kesejahteraan sosial. Responden penelitian ini berjumlah 60 orang terdiri dari masyarakat desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, ditambah informan pendukung antara lain *stakeholder* dan tokoh masyarakat. Penentuan ini dilakukan secara purposive sesuai dengan kebutuhan data yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terkait dengan topik penelitian. Penentuan responden dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif disajikan dalam persentase untuk memperoleh informasi yang menjelaskan tentang upaya masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang sangat jauh dari pusat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dan sulit dijangkau karena berada di pegunungan, sehingga infrastruktur di lokasi tersebut masih sangat kurang memadai. Sarana pendidikan dan kesehatan masih sangat minim, SDM masih sangat rendah, banyak pengangguran, dan angka kemiskinan masih sangat tinggi, sehingga mereka lebih sulit untuk mempertahankan kesejahteraan sosialnya, kegiatan ekonomi mereka masih sangat tergantung pada negara tetangga Malaysia, yang berdampak pada minimnya nasionalisme karena lebih mengharapkan ringgit dari pada rupiah.

**Kata kunci:** *perbatasan antarnegara; ketahanan sosial masyarakat*

## A. Pendahuluan

Wilayah perbatasan Indonesia dengan pulau yang berada di luar berjumlah 92, merupakan kawasan tertinggal dengan sarana prasarana sosial dan ekonomi yang sangat terbatas. Di masa lalu, kawasan perbatasan dipandang sebagai wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Akibatnya, di sejumlah daerah kawasan perbatasan tidak tersentuh pembangunan. Beberapa isu hingga kini masih menjadi permasalahan diantaranya ideologi budaya asing, potensi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), pembalakan liar (*illegal logging*), penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*), terutama perempuan dan anak-anak, imigran gelap (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkoba, jalan masuk para teroris serta perompak, dan konflik sosial budaya.

Masyarakat di kawasan itu umumnya miskin dan kehidupan di kawasan perbatasan dapat dikatakan tidak layak, dan lebih berorientasi ke negara tetangga. Infra struktur seperti akses jalan, komunikasi dan listrik sangat terbatas. Luasnya permasalahan sosial yang dihadapi kawasan perbatasan dapat dilihat dari luasnya perbatasan darat Indonesia Malaysia yakni seluas 3050 km<sup>2</sup> (Moeldoko, 2012)

Kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat perbatasan dan negara tetangga dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat setempat seperti adanya ketergantungan ekonomi, karena negara tetangga Malaysia membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasan melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan. Di era globalisasi terjadi percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat masuknya budaya asing di Indonesia. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ini telah memberikan keuntungan baik pemerintah maupun masyarakat negara tetangga.

Pada umumnya wilayah perbatasan masuk dalam kriteria desa miskin, dengan pertumbuhan cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan desa di sekitarnya. Karakteristik dan ciri khas masing-masing dipengaruhi kultur budaya etnis, kearifan lokal dan potensi alam yang ada di kawasan tersebut. Karakteristik tersebut berupa fisik, terutama garis batas darat yang tidak jelas dan tegas. Pilar batas di sepanjang garis batas masih sangat terbatas dan kondisinya darurat. Sebagian besar kawasan perbatasan di darat berada di pedalaman dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit dijangkau dan perlu dilindungi. Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta permukiman masih sangat terbatas. Penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak merata, bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia diperlihatkan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Beberapa faktor penyebab lambatnya pertumbuhan desa-desa di daerah perbatasan diantaranya: belum ditemukannya secara mendalam dan menyeluruh mengenai potensi sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan yang merupakan faktor pendukung ketahanan masyarakat perbatasan, lemahnya kemampuan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dibanding jumlah penduduk yang harus dilayani, dan kurang terdistribusi secara merata pelayanan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan (Listiyah Miniarti, 2000).

Mengamati kompleksnya permasalahan masyarakat wilayah perbatasan serta sulitnya mempertahankan kesejahteraan sosialnya, maka permasalahan penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah: bagaimana upaya masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kesejahteraan sosial dan faktor pendukung serta penghambat dalam mempertahankan kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah diketahui upaya masyarakat perbatasan dalam mempertahankan

kesejahteraan sosial dan diketahui faktor pendukung serta penghambat dalam mempertahankan kesejahteraan sosial.

Manfaat penelitian adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terutama dalam hal pembangunan dan program pelayanan sosial di kawasan perbatasan serta referensi bagi peneliti yang berminat pada kawasan perbatasan.

### **Karakteristik Wilayah Perbatasan Darat Antarnegara**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 menyebutkan, bahwa batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Perbatasan sebuah negara (*state's border*) dapat dipandang dalam konsep batas negara sebagai sebuah ruang geografis (*geographical space*) dan atau batas negara sebagai ruang sosial budaya (*sosial culture space*).

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, dan menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, dan hukum nasional serta internasional (Moeldoko, 2012).

Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di tiga pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT. Setiap kawasan perbatasan memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Kawasan perbatasan di Kalimantan berbatasan dengan Negara Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera. Kawasan perbatasan di Papua masyarakatnya relatif setara dengan masyarakat PNG, sementara dengan Timor Leste kawasan perbatasan Indonesia masih relatif lebih baik dari segi infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Pulau Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di delapan kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 kilometer yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Bengkayang. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 kilometer yang melintasi 256 desa dalam 9 kecamatan dan 3 kabupaten yaitu di Nunukan, Kutai Barat, dan Malinau. Dari lima kabupaten di Kalimantan Barat dan tiga kabupaten di Kalimantan Timur, hanya terdapat tiga pintu perbatasan (*border gate*) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, serta Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Kabupaten Sanggau dan Nunukan memiliki fasilitas *Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS)* dengan kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat lain masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk.

Potensi sumber daya alam kawasan perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Beberapa sumber daya alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Bentuang Kerimun, Suaka Margasatwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur.

Secara garis besar permasalahan kawasan perbatasan dapat dikelompokkan pada tiga aspek berikut. Pertama, aspek sosial ekonomi wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang), hal tersebut

disebabkan lokasi yang relatif terisolasi atau terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal), serta langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (*blank spots*). Kedua, aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan merupakan teritorial yang luas dengan pola penyebaran penduduk tidak merata. Hal itu menyebabkan pengendalian oleh pemerintah sulit dilakukan. Ketiga, pengaruh negara tetangga pada aspek sosial ekonomi di kawasan perbatasan dapat mengundang kerawanan baik di bidang ekonomi maupun politik (Djaka Marwasta. 2016).

Karakteristik kawasan perbatasan ada tujuh macam yaitu karakteristik fisik garis batas di darat dan laut belum jelas dan pasti, pilar batas di sepanjang garis batas masih sangat terbatas dan kondisinya darurat, garis batas di laut ditentukan oleh keberadaan pulau-pulau terluar yang terpencil. Sebagian besar kawasan perbatasan di darat berada di pedalaman dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit dijangkau dan perlu dilindungi. Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta permukiman masih sangat terbatas, jumlah Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB) masih terbatas. Karakteristik penduduk, penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia diperlihatkan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk rendah akibat tingginya angka kematian. Arus mobilitas tenaga kerja dan penduduk keluar-masuk cukup tinggi.

Secara etnis, penduduk yang berada di perbatasan memiliki hubungan keluarga dengan saudara di negara tetangga. Karakteristik ekonomi,

tingginya perbedaan harga jual produk-produk lokal jika dibanding dengan negara tetangga, rendahnya nilai kurs rupiah terhadap kurs negara tetangga, keberadaan produk-produk yang berasal dari sumberdaya alam belum memiliki nilai tambah karena merupakan produk mentah. Perekonomian masyarakat sebagian besar adalah miskin dan umumnya mata pencaharian adalah petani dan nelayan tradisional. Transaksi perdagangan dilakukan secara tradisional. Hasil usaha yang diperoleh sebagian besar dikonsumsi sendiri. Karakteristik sumberdaya alam, potensi sumberdaya alam di wilayah perbatasan meliputi potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan/pertanian, perikanan, dan sumberdaya air (daerah tangkapan air).

Setiap wilayah perbatasan negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang dipengaruhi kultur budaya etnis, kearifan lokal dan potensi alam yang ada di kawasan tersebut. Wilayah perbatasan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia). Luas Desa Jagoi seluruhnya sekitar 2.500 Ha, terdiri dari hunian, ladang, kebun, dan hutan. Wilayah Desa Jagoi ini sebagian besar merupakan daerah berbukit, karena itu areal ladang dan kebun relatif cukup luas. Sebelum tahun 1997 Desa Jagoi ini merupakan salah satu desa bagian dari wilayah Kecamatan Seluas. Setelah ada pemekaran baru, yakni pembentukan Kecamatan Jagoi Babang, maka desa ini menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Jagoi Babang.

Dari Kabupaten Bengkayang menuju Kecamatan Jagoi Babang diperlukan waktu tempuh kurang lebih tiga hingga empat jam dengan kendaraan roda empat kecepatan sedang. Kondisi jalan berkelok, bergelombang, dan naik turun mengharuskan kendaraan melaju dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan dari Bengkayang menuju Jagoi Babang terlihat hamparan hutan yang sangat luas ditumbuhi aneka tanaman sebagai potensi alam, antara lain kelapa sawit, sahang (merica), ketela pohon (singkong), kelapa, sayuran, dan tanaman hutan lain, serta

sedikit dijumpai tanaman padi, perkebunan karet (dominan), sawit, dan cacao. Selain hutan yang ditumbuhi aneka tanaman, air yang melimpah menjadi potensi alam di Jagoi Babang. Keterseediaan sumber air yang melimpah telah diolah menjadi sumber air bersih yang banyak dimanfaatkan oleh warga Jagoi Babang, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan sumber air bersih.

### **Ketahanan Sosial Masyarakat**

Ada dua pandangan tentang ketahanan sosial. Pandangan pertama menyatakan, bahwa ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, selain ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan militer merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional. Pandangan lain menyebutkan, bahwa ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas (*local/ grassroot community*) dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap dapat koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua pandangan tersebut bukanlah pandangan dikotomis, namun dapat dipadukan menjadi pemahaman yang lebih komprehensif.

Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggalang konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang. Jadi, ketahanan sosial merupakan produk interaksi dinamis antara faktor eksogen dengan endogen, sehingga kemam-

puan tersebut menunjukkan adanya aspek dinamika dan keseimbangan (*community homeostatic and dynamic*). Kemampuan di sini bukan hanya sekedar kemampuan bertahan, tetapi di dalamnya ada unsur dinamik yaitu kemampuan untuk segera kembali kepada kondisi semua atau justru lebih baik lagi. Ketahanan sosial juga mengandung kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik. Ketahanan sosial mengandung arti kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan. Berdasar uraian tersebut, maka ketahanan sosial bukanlah suatu *finish product*, tetapi sebagai proses dan dinamika masyarakat (Kemensos RI, 2008).

Pendapat lain mengatakan bahwa ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Pengertian secara lebih lengkap adalah suatu kondisi kehidupan dinamis masyarakat yang ditandai oleh terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar, optimalnya pelaksanaan peranan dan tugas-tugas kehidupan pada setiap individu maupun kelompok, serta terselesaikannya masalah sosial melalui gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial (Suradi, 2005). Ketahanan sosial masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi, karena dua dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak mungkin dipisahkan, sehingga tidak ada ketahanan sosial masyarakat tanpa ketahanan ekonomi, begitu pula sebaliknya.

Pusat Kajian Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Departemen Sosial RI (Muttaqin dkk, 2005), mendefinisikan ketahanan sosial masyarakat terdiri dari empat aspek yaitu: (1) Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan PMKS. (2) Partisipasi dalam organisasi sosial. (3) Pengendalian terhadap konflik sosial, dan (4) Kearifan lokal dalam memelihara potensi alam dan potensi sosial. Keempat variabel tersebut merupakan indikator upaya ketahanan sosial masyarakat.

## B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif yang akan mendeskripsikan mengenai karakteristik masyarakat perbatasan seperti kondisi wilayah, budaya, tingkat pendidikan, pekerjaan, sumber daya alam, fasilitas kesehatan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan keterampilan. Informan penelitian terdiri dari aparat desa dan masyarakat perbatasan sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang obyektif dan mendalam tentang karakteristik masyarakat perbatasan.

Analisa data dengan menggunakan analisa kualitatif dalam bentuk uraian dan persentase sesuai dengan tujuan penelitian yaitu: (1) Upaya yang dilakukan masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kesejahteraan sosialnya, dan (2) Potensi dan sumber kesejahteraan yang dimanfaatkan.

## C. Kondisi Masyarakat Perbatasan dan Kesejahteranya

Desa Jagoi terdiri dari tiga dusun yakni Sei Take, Risau dan Jagoi. Dari tiga dusun tersebut yang terpadat adalah Dusun Risau. Sedangkan dusun yang terdekat dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah Dusun Jagoi. Batas Desa Jagoi sebelah Timur dengan Serawak (Malaysia), sebelah Barat dengan Kecamatan Seluas, sebelah Utara Desa Sekida, sebelah Selatan Kecamatan Siding. Luas Desa Jagoi seluruhnya sekitar 2.500 Ha, terdiri dari hunian, ladang, kebun, dan hutan. Wilayah Desa Jagoi ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan, dan karena itu areal ladang dan kebun relatif cukup luas. Secara geografis Desa Jagoi ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia (Serawak). Oleh karena itu, di desa ini terdapat "*border*", meskipun belum tertata secara rapi sebagaimana yang ada wilayah lain (misalnya di Entikong - Sanggau) (BPS Kecamatan Jagoi Babang, 2014).

Jumlah penduduk Desa Jagoi seluruhnya 1846 jiwa, terdiri dari 1052 laki-laki dan 794

perempuan, dengan jumlah seluruhnya 333 KK. Penduduk Desa Jagoi terdiri dari mayoritas penduduk asli (suku Dayak Bedayuh) dan suku pendatang (suku Dayak lainnya, Melayu, Jawa, Bugis, dan suku-suku lainnya). Suku Bedayuh ini pada mulanya berasal dari wilayah Malaysia; dan oleh karena itu jumlah terbanyak suku ini berada di Malaysia. Terkait dengan kondisi tersebut, antara suku Bedayuh perbatasan dengan suku Bedayuh di Malaysia sebagian besar mempunyai hubungan kekeluargaan. Hingga kini mereka masih sering berkunjung, baik untuk urusan ekonomi maupun urusan hubungan kekerabatan. Untuk keperluan ini pemerintah desa/kecamatan setempat memfasilitasi dengan dokumen berupa Pas Lintas Batas (PLB) yang bisa digunakan masuk wilayah Malaysia sampai pada jarak/batas tertentu dan dengan waktu yang terbatas (BPS Kecamatan Jagoi Babang, 2014).

Hasil wawancara dan observasi di lapangan, budaya penduduk Jagoi yang positif dan masih dijunjung dengan baik adalah penghormatan terhadap milik orang lain. Bagi masyarakat Dayak, pantang merebut/ merubah batas tanah milik orang lain tanpa persetujuan pemilik, demikian pula dengan tanaman padi biar segelintirpun pantang mereka untuk mengambilnya, karena hal ini akan membawa keburukan bagi kehidupan keluarga dan keturunannya. Mereka juga tidak mudah digerakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya protes atau demo) tanpa mengetahui keuntungan yang bisa mereka peroleh. Sikap protes terhadap orang-orang atau pemimpin desa yang mereka anggap kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, hanya dalam bentuk sikap tidak suka, masa bodoh, tidak mpedulikan perintah atau kebijakannya dan berbagai sikap apriori lainnya. Sikap positif lainnya adalah sikap terbuka masyarakat Jagoi untuk menerima penduduk pendatang dan menerima perubahan. Mereka mudah menerima perubahan, terutama bila disertai bukti nyata yang memberikan keuntungan dan kemajuan bagi mereka.

Kebiasaan negatif yang masih hidup hingga kini adalah kebiasaan minum-minuman keras (baik untuk alasan kesehatan ataupun mabuk-mabukan), dan berjudi (baik judi lokal maupun judi buntut dari negara tetangga). Di beberapa tempat tertentu (umumnya warung kopi dan minuman lainnya) ketika hari mulai menjelang malam sampai larut malam banyak berkumpul warga untuk bermain judi. Masuknya agama baru, utamanya Agama Katolik dan Kristen Protestan, tampaknya belum mampu merubah kebiasaan negatif tersebut. Perubahan yang tampak menurut tokoh setempat, adalah dalam hal kegiatan sosial keagamaan dan dalam hal adat pernikahan sudah dilakukan dan dicatat melalui Gereja. Hal yang unik pada penduduk asli adalah tidak adanya kebiasaan menyelenggarakan pesta pernikahan. Pesta yang terjadi hanya berupa pesta adat tiap tahun, yang mereka sebut “*Gawe*”. Pesta ini dilakukan pada pertama membuka ladang, yakni sekitar bulan enam (bulan Juni).

Sumber daya alam yang cukup besar di Desa Jagoi adalah tanah ladang kebun dan hutan. Hasil utama kebun di Desa Jagoi adalah karet, kelapa sawit, dan sahang/lada. Untuk perkebunan kelapa sawit saat ini ada yang dikelola warga secara perorangan (sebagian baru mulai tanam), dan ada yang dikelola perusahaan (sudah mulai panen). Ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Jagoi seperti PT DJI, PT Led Lestari, PT WKN, dan PT CERIA Prima. Perusahaan-perusahaan ini ada yang menggunakan sebagian tanah penduduk maupun tanah hutan. Hingga kini belum ada kesepakatan tentang persentase keuntungan yang bisa diberikan kepada desa untuk kesejahteraan penduduk. Tidak seperti di daerah lain misalnya di Jawa Tengah (pengalaman peneliti di Kabupaten Rembang), pada desa-desa pinggiran hutan dibentuk Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) yang bertugas mengatur penggunaan tanah hutan oleh penduduk, termasuk kesepakatan dengan pengelola hutan (dalam hal ini PT Perhutani) untuk berbagi hasil dari penjualan hasil hutan

(kayu jati) untuk desa setempat yakni sekitar dua persen dari hasil penjualan.

Bagi penduduk Desa Jagoi, keberadaan perusahaan-perusahaan kelapa sawit tersebut hingga kini belum memberikan kontribusi bagi kesejahteraan penduduk sekitar. Apalagi bagi perusahaan yang menggunakan sebagian tanah penduduk belum ada kejelasan tentang pembagian hasil yang diperoleh para pemilik tanah.

Sumber daya alam yang saat ini memberikan manfaat dan telah dikelola dengan baik adalah sumber air bersih bagi penduduk, yang dialirkan melalui pipa-pipa ke rumah penduduk. Sumber daya alam lain seperti hasil sungai berupa pasir sudah mulai digali oleh sebagian penduduk, namun jumlahnya masih terlalu kecil dan merupakan kegiatan tambahan.

### **Fasilitas Kesehatan**

Pembangunan sarana kesehatan dimaksudkan agar kesehatan masyarakat lebih baik. Di Kecamatan Jagoi Babang telah ada satu puskesmas dan untuk menjangkau ke desa-desa terpencil telah ada tiga polindes dan dua Puskesmas keliling. Tenaga medis yang tersedia terdapat seorang dokter, dua orang bidan, dan empat orang mantri kesehatan. Program layanan jaminan kesehatan yang berasal dari pemerintah yaitu Jamkesmas dan Jamkesda bahkan BPJS kesehatan sudah mulai dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kecamatan Jagoi Babang. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program layanan kesehatan. Belum terjangkaunya program layanan kesehatan antara lain disebabkan oleh ketidak tahuan tentang program, proses pelayanan yang dirasa sulit dimengerti, serta jauhnya jarak antara tempat tinggal.

### **Umur Responden**

Umur sangat berkaitan dengan produktivitas seseorang dalam hal kegiatan ekonomi, baik di pemerintahan, perusahaan swasta ataupun usaha sendiri, karena produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu

kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini (Husein Umar, 2000). Diduga, hubungan antara umur dan kinerja merupakan hal yang makin penting karena ada keyakinan umur seseorang makin tua kinerjanya akan semakin merosot.

Mengenai umur responden secara lebih jelas dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 1. Umur Responden

No	Usia Responden	f	%
1	20-21	1	2
2	30-39	14	23
3	40-49	26	44
4	>60	11	18
Jumlah		60	100

Sumber: Data Primer 2016 Diolah

Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa sebagian besar responden sejumlah 44 persen berusia 40 hingga 49 tahun, dan peringkat kedua terbanyak adalah mereka yang berusia 30 hingga 39 tahun yakni 23 persen, usia tersebut merupakan usia kerja. Jumlah penduduk dengan usia kerja merupakan modal pembangunan apabila dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Mutu angkatan kerja yang baik tercermin dari SDM yang baik di antaranya adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang baik. Apabila jumlah penduduk besar dengan kualitas penduduk rendah maka menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi, karena SDM yang rendah dengan tingkat keterampilan rendah akan menempati posisi rendah pula. Persaingan tenaga kerja yang siap pakai menjadikan mereka tidak punya posisi tawar.

### Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Wilayah perbatasan yang menjadi lokus penelitian merupakan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten. Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan pada umumnya kurang dalam hal fasilitas, baik kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktural yang kurang memadai.

Keterpencilan menjadi alasan lebih sedikitnya pengembalian kebijakan untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di kawasan tersebut. Pendidikan menjadi kebutuhan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali yang berada di wilayah perbatasan. Belum semua warga negara memperoleh hak layanan pendidikan seperti yang terjadi di wilayah perbatasan. Sebagian besar masyarakat di wilayah perbatasan belum memperoleh hak layanan pendidikan dengan baik.

Pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi pembangunan sumber daya manusia namun kawasan perbatasan masih minim dalam fasilitas tersebut. Minimnya fasilitas akan diimbangi rendahnya minat untuk menempuh pendidikan secara formal. Hasil kajian mengenai pendidikan responden di wilayah Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga

No	Pendidikan Terakhir	f	%
1	Tidak Sekolah	4	7
2	Belum/Tidak tamat SD	17	28
3	SD/MI	27	45
4	SMP/MTs	6	10
5	SMA/SMK/MA	5	8
6	Diploma III/sarjana Muda	1	2
Jumlah		60	100

Sumber: Data Primer 2016 Diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa subyek penelitian warga wilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, yakni sebesar 45 persen atau 27 orang. Secara berturut-turut diikuti responden yang belum/tidak tamat SD atau sederajat sebesar 28 persen atau sebanyak 17 orang, tamat SMP/MTs/Sederajat sebanyak 6 orang atau 10 persen, tamat SMA atau SMK atau MA atau sederajat sebanyak 5 orang atau 8 persen, tamat Diploma III/Sarjana Muda sebanyak satu orang atau 1.67 persen, dan tidak sekolah sebanyak 4 orang atau 7 persen.

Dari data tersebut diketahui pula, bahwa kesadaran masyarakat Desa Jagoi untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan masih sangat rendah. Melihat kondisi wilayah perbatasan yang berada di pedalaman dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit dijangkau, berimbas pula pada minimnya fasilitas pendidikan di desa tersebut.

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan manusia. PBB terkait pentingnya pendidikan bagi manusia, menuangkannya dalam delapan tujuan pada butir ke dua yaitu mencapai pendidikan dasar universal (UN, 2011). Indeks pendidikan menjadi salah satu poin dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya meningkatkan IPM di suatu wilayah harus diikuti dengan meningkatnya Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Kemampuan Daya Beli. Pendidikan yang semakin tinggi maka IPM sebuah daerah akan semakin tinggi pula. Opini publik juga menyebutkan, bahwa kemiskinan bisa menutup akses kemajuan seseorang termasuk salah satunya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya (Wahid, 2008).

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia permasalahan terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga. Terlihat pula bahwa pemerintah daerah perbatasan lebih sulit memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, yang merupakan salah satu indikator ketahanan sosial masyarakat.

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan SDM negara tetangga yaitu Malaysia, sehingga banyak tenaga kerja Indonesia yang berhijrah ke Malaysia menjadi TKI yang tidak mesyaratkan pendidikan tinggi dan dibayar dengan honor murah.

### **Mata Pencaharian Penduduk**

Hasil pengamatan mengungkapkan, bahwa di Kecamatan Jagoi Babang sudah banyak terlihat pertokoan sembako serta perabotan rumah tangga. Berdasar pengamatan di lapangan, bahwa sembako dan sebagian besar peralatan rumah tangga berasal dari Malaysia. Selain menyediakan barang-barang dari Malaysia, toko tersebut juga menjadi tempat penukaran uang rupiah menjadi ringgit. Toko yang ada di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang sebagian besar dikelola oleh warga Malaysia. Tersedianya barang-barang dari Malaysia, tingginya minat warga masyarakat terhadap produk Malaysia dan mudahnya mendapat uang ringgit menjadi faktor pendorong bagi warga masyarakat Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang lebih memilih barang-barang Malaysia daripada dari Indonesia.

Kecamatan Jagoi Babang belum memiliki pasar sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat Jagoi Babang lebih memilih memanfaatkan pasar di wilayah Malaysia ketimbang pasar di wilayah Indonesia. Kegiatan perekonomian di wilayah Indonesia dilakukan masyarakat Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan menempuh beberapa desa dengan jarak dan waktu lebih jauh dan lebih lama, sementara daya beli masyarakat setempat belum memadai. Akan lebih menguntungkan bagi masyarakat jika hasil pertanian dan kerajinan tangan masyarakat Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang dipasarkan di wilayah perbatasan dengan jarak dan waktu tempuh lebih cepat serta lebih dekat. Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya warga masyarakat Jagoi Babang yang membawa sayur-mayur untuk dijual di Pasar Sirikin, sebuah pasar di perbatasan.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat diketahui, bahwa di perbatasan Desa Jagoi belum tersedia sarana kegiatan ekonomi yang memadai, sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga: "Di Desa Jagoi belum ada pasar tradisional yang mampu menampung penjual dari desa setempat." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berupa

pasar tradisional bagi warga masyarakat kurang diperhatikan dikarenakan lokasi jauh dan sulit dijangkau. Warga perbatasan darat antarnegara mengalami kendala dalam mempertahankan kesejahteraan ekonominya, mereka berharap ada pembeli dari negara tetangga agar bisa mempertahankan hidupnya.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Jagoi Babang dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	f	%
1	Usaha sendiri	74	24
2	Buruh tetap/tidak tetap	9	3
3	Karyawan/pegawai tetap	14	5
4	Buruh pertanian tidak tetap	22	7
5	Buruh non pertanian tidak tetap	29	10
6	Tidak bekerja	118	39
7	Lain-lain	37	12
Jumlah		303	100

Sumber: Data Primer, 2016, Diolah

Data pada tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar responden beserta seluruh keluarga berjumlah 118 orang (39 persen) tidak bekerja. Hal ini menunjukkan, bahwa pekerjaan sangat berkaitan dengan SDM berupa tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang. Makin tinggi SDM seseorang maka makin tinggi pula pekerjaan yang ditekuni. Data pada tabel tiga relevan dengan data tabel satu yang menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan sebagian besar responden hanya tamat SD dan sebagian besar lain tidak tamat SD.

Banyak penduduk yang tidak bekerja berimbas pada tingginya angka kemiskinan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Penduduk tidak bekerja dapat juga disebut dengan pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin

mendapat pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS: 2010).

Data pada tabel tiga juga menunjukkan, bahwa mayoritas kedua (24 persen) penduduk memiliki usaha sendiri. Mereka kebanyakan adalah pemilik toko dan harus bersaing dengan pendatang orang Malaysia, karena produk yang mereka jual merupakan produk negara tetangga Malaysia.

Menurut Sumarsono (2009: 2-3), tenaga kerja atau SDM adalah manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Orang dalam usia kerja, dengan kata lain dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *manpower*. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).

Masyarakat perbatasan lebih sulit mempertahankan kesejahteraan sosial karena ketahanan sosial erat berkaitan dengan ketahanan ekonomi. Dua dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak mungkin dipisahkan, sehingga tidak ada ketahanan sosial masyarakat tanpa ketahanan ekonomi begitu pula sebaliknya.

Kearifan lokal sebagai salah satu indikator ketahanan sosial masyarakat dapat diketahui dari adanya upaya pemerintah daerah setempat dengan memfasilitasi dokumen berupa pas lintas batas (PLB) yang bisa digunakan masuk wilayah Malaysia sampai pada jarak atau batas tertentu dan dengan waktu yang terbatas (BPS Kecamatan Jagoi Babang, 2014).

### Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk Kecamatan Jagoi Babang belum terdata secara baik. Data PMKS yang ada diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bengkayang. Informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang menunjukkan, bahwa dari 24 PMKS yang terdata baru teridentifikasi enam jenis PMKS. Aparat Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang mengungkapkan, bahwa hal ini terjadi antara lain karena kurang maksimalnya fungsi tenaga sosial fungsional yang bertugas baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Petugas sosial fungsional di tingkat kecamatan (TKSK) hanya satu orang bertugas sebagai pengumpul data serta mediator dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Hingga saat ini belum mampu melaksanakan tugas secara baik. Jauhnya jarak antara kabupaten dengan kecamatan, serta rendahnya honor (Rp 500.000,-) setiap bulan menjadi alasan bagi TKSK kurang peduli dalam melakukan pendataan. Menurut penuturan aparat Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang, komunikasi yang kurang intensif antara TKSK dengan Dinas Sosial menjadi musabab lemahnya kinerja TKSK dalam melaksanakan tugasnya. Tabel berikut menjelaskan tentang jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan Jagoi Babang.

Tabel 4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Jenis Permasalahan Sosial	f	%
1	Penduduk Miskin	573	60,77
2	Rumah Tidak Layak Huni	270	28,63
3	Lanjut Usia Terlantar	73	7,74
4	Orang dengan Kecacatan	25	2,66
5	Anak Berhadapan dengan Hukum	1	0,10
6	Rawan Bencana Sosial	1	0,10
Jumlah		943	100

Sumber: Data Primer 2016, Diolah

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial terbesar adalah kemiskinan dengan jumlah 60,76 persen, kemudian disusul rumah tidak layak huni dengan jumlah 28,63 persen. Keterbelakangan pembangunan (*under-development*) khususnya di dae-

rah perbatasan antarnegara mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber pemenuh kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam katagori miskin, hidupnya serba kekurangan, sedang kesenjangan adalah sebuah kondisi di mana di dalamnya terjadi ketimpangan akses pada sumber ekonomi (*economic resources*) (Usman, 2004).

Tingginya angka kemiskinan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang yang merupakan daerah perbatasan antarnegara disebabkan lokasinya yang sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman perbukitan, pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis yang sulit dijangkau oleh jaringan transportasi dan media komunikasi. Sumber daya manusia masyarakat di daerah perbatasan mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan relatif rendah.

Penyebab kemiskinan lain dikarenakan tidak jelasnya penggunaan dan pembagian hasil dari tanah penduduk yang dipergunakan oleh perusahaan kelapa sawit, tidak ada organisasi sosial atau pemangku adat yang berfungsi sebagai mediator antara pengusaha dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini agar kesejahteraan masyarakat perbatasan meningkatkan.

Belum dimilikinya hak paten pada pembuatan tikar dari rotan yang merupakan andalan keterampilan penduduk setempat, membuka kecenderungan pengambilalihan hak cipta anyaman bidai sebagai kekayaan budaya Indonesia menjadi kekayaan budaya negara tetangga (Malaysia).

### Faktor Pendukung

Peran pemerintah daerah terutama di era otonomi daerah, mengimplikasikan pembangunan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelolanya, sehingga permasalahan perbatasan dapat diselesaikan secara efektif karena pembangunan perbatasan juga merupakan pembangunan daerah. Fasilitas

kesehatan yang disediakan Dinas Kesehatan cukup maksimal, selain ada sebuah Puskesmas, ada tiga poliklinik desa (polindes) dan Puskesmas keliling yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat perbatasan menjangkau fasilitas kesehatan.

Hampir seluruh wilayah perbatasan darat di Kecamatan Jagoi Babang merupakan hutan tropis dan daerah konservasi. Sumber daya alam berupa hutan tropis, tanah ladang, kebun kelapa sawit, lada dan hutan cukup besar, diharapkan dapat dilindungi, dibudidayakan bagi kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat perbatasan.

Kearifan lokal yang memfasilitasi masyarakat perbatasan berupa dokumen pas lintas batas (PLB) yang bisa digunakan masuk wilayah Malaysia sampai pada jarak atau batas tertentu dan dengan waktu yang terbatas, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan untuk menjual hasil produksinya baik berupa tikar anyaman rotan, kelapa sawit, lada, ataupun membeli barang keperluan sehari-hari seperti sembako dan gas.

### **Faktor Penghambat**

Kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik menyebabkan investor swasta tidak tertarik untuk masuk ke daerah ini. Kondisi demikian pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur negara tetangga yang lebih baik. Hal tersebut menyebabkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya berorientasi ke negara tetangga Malaysia. Secara jangka panjang adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi mengundang kerawanan di bidang sosial ekonomi dan politik. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat perbatasan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Minimnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan menjadikan minimnya rasa nasionalisme dan merasa bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Minimnya rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan mengakibatkan mereka ingin menjadi warga negara tetangga dengan cara memindahkan patok tapal batas.

### **D. Penutup**

**Kesimpulan:** Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa masyarakat perbatasan antarnegara lebih sulit untuk mempertahankan kesejahteraan sosialnya karena dilihat dari segi geografis lokasi mereka di pedalaman dan sangat jauh dari pusat pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat. Dari segi usia penduduk, sebagian besar merupakan usia produktif untuk bekerja, namun sebagian besar dari mereka tidak bekerja atau pengangguran, dan SDM merekapun sangat rendah karena sebagian besar penduduk merupakan kepala keluarga berpendidikan SD. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perbatasan berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, namun dalam rangka mempertahankan kesejahteraan sosialnya, upaya yang mereka lakukan di bidang ekonomi antara lain menjual hasil produksi berupa tikar anyaman rotan, lada, kelapa sawit ke negara tetangga Malaysia. Begitu pula sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka belanja barang produksi Malaysia yang jauh lebih mudah didapat dan harganya jauh lebih murah jika dibanding dengan barang dari Indonesia. Sulitnya masyarakat perbatasan mempertahankan ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional menyebabkan mereka ingin menjadi warga Negara Malaysia, karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.

**Saran:** diperlukan peranserta seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah dalam membangun kawasan perbatasan darat antarnegara seperti Kecamatan Jagoi Babang, serta peranserta dunia usaha agar berinvestasi di kawasan tersebut, mengingat sumber daya alam yang dimiliki begitu besar. Diperlukan pemberdayaan ekonomi untuk mempercepat pembangunan sosial agar masyarakat perbatasan berdaulat, sejahtera dan berdaya saing. Jadi tidak hanya

pendekatan keamanan, namun perlu diimbangi dengan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan sehingga masyarakat bisa mempertahankan kesejahteraan dan sekaligus ketahanan nasional masyarakat setempat.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu kelancaran penelitian ini hingga selesai. Pertama kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai pemberi donor penelitian ini. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang, dan juga kepada seluruh responden terutama tokoh masyarakat setempat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

### Pustaka Acuan

- BPS. (2010). *Keadaan Angkatan Kerja di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- Djaka Marwasta. (2016). *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan*. Yogyakarta: *Indonesian Journal of Community Engagement*.
- Husein Umar. (2000). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kemensos RI. (2008). *Ketahanan Sosial Masyarakat, Kewaspadaan Nasional Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : Kemensos RI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. (2011). *Buku Utama Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi Dan Program Pembangunan*.
- Listiyah Miniarti. (2000). *Peranan Potensi Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah Perbatasan di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: Fak Geografi UGM.
- Moeldoko. (2012). *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan.: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*. Jurnal Pertahanan Edisi ke 1 2012. Jakarta.: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Muttaqin. Et. Al. (2005). *Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat. Implementasi Pemberdayaan Prana Sosial*. Jakarta : Pusbang Tansosmas Balatbang Sosial. Departemen Sosial.
- Sumarsono, Sonny. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suradi. (2008). *Peran Kapital Sosial dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11. No 2.
- UN. (2011). *The Millennium Development Goals Report*. New York.
- Usman Soenyoto, (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wahid, A. (2008). *Pendidikan Versus Kemiskinan 2*. <https://abdulwahidilyas.wordpress.com/2010/08/26/pendidikan-vs-kemiskinan>.

